



RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini dapat disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta. Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi bagi seluruh Perangkat Daerah tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta selama Tahun 2025.

Kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, masukan, serta dukungan dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 ini dapat menjadi acuan strategis yang efektif dalam meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan daerah yang berkelanjutan

Purwakarta, 12 September 2025

Plt. INSPEKTUR



H. YAYAT HIDAYAT, S.Sos., CGRE

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197002151997031009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PERUBAHAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	12
2.1 Evaluasi Perubahan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025	12
2.2 Permasalahan Pelaksanaan Program Triwulan II Tahun 2025	22
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	25
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan	28
BAB V PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses berkelanjutan dalam penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya dalam upaya pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada guna meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah memiliki ruang lingkup terdiri dari atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dengan prinsip mempertimbangkan kondisi, potensi dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah, tetap mengacu pada rencana tata ruang dan dilaksanakan secara bersama semua pemangku kepentingan dalam bingkai satu kesatuan.

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 mencerminkan komitmen dan usaha dalam dalam mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Purwakarta yaitu "PURWAKARTA ISTIMEWA" dengan pendekatan aspek Pengawasan, Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing Daerah. Arah kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta adalah Pembangunan Budaya Organisasi Pemerintah yang bersih, akuntabel, efektif dan Professional dan Peningkatan Jumlah Aparatur yang memiliki Jabatan Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD), melalui

penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) pada semua tingkatan dan lini pemerintahan serta pada semua program dan kegiatan. Pemberian sanksi yang seberat-beratnya bagi pihak yang melakukan tindakan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan peningkatan efektivitas pengawasan aparatur melalui koordinasi dan sinergi pengawasan serta percepatan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan dan pemeriksaan serta guna mewujudkan sistem pengawasan dan audit serta akuntabilitas kinerja yang efektif dan akuntabel sesuai dengan mandat program Kementerian Negara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui penyempurnaan sistem pengawasan dan audit, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mewujudkan aparatur yang bersih.

Peningkatan pengawasan dapat dilakukan dengan cara meningkatkan intensitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan dan audit internal dan audit eksternal serta pengawasan oleh masyarakat, menata dan menyempurnakan kebijakan sistem struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan terukur, menindaklanjuti temuan pengawasan meningkatkan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif (APIP, SPIP).

Uraian yang disebutkan di atas merupakan salah satu pelaksanaan dari fungsi manajemen yaitu pengawasan. Pengertian pengawasan tersebut perlu ditanamkan kepada setiap pejabat pemerintah dan masyarakat untuk menjamin terlaksananya perencanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pejabat pemerintah dan masyarakat diharapkan turut berpartisipasi dalam mewujudkan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari RPD Tahun 2024 - 2026. Perubahan Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang diselaraskan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 didasari pada penyesuaian proyeksi kebutuhan pagu anggaran belanja daerah pada masing-masing perangkat daerah dan disesuaikan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah dan kemampuan riil keuangan daerah.

Untuk itu perumusan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja (Renja PD) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 akan menyelaraskan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan di tingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat Pemerintah Daerah.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2006 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);

30. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 66);
31. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 78 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 78);
32. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 44).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 yakni sebagai dasar dan acuan bagi penyusunan program dan kegiatan tahunan, serta guna mendukung pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dimaksudkan untuk menjabarkan perubahan rencana pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, pendanaan indikatif serta perkiraan maju berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025-2029 dan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah :

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan melayani;

2. Terwujudnya aparatur yang bersih, akuntabel, transparan, profesional, independen, objektif dan berorientasi pada perbaikan serta pencegahan dini dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal;
3. Tersedianya dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan sebagai pedoman dalam penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahun (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025;
4. Tersedianya sarana pengendalian kinerja yang akan dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu selama lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan beberapa hal yang menjadi latar belakang penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Bab Ini menguraikan Realisasi Pelaksanaan Anggaran atas Tahun Anggaran 2025

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan telaahan langkah strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025 terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah pada Tahun 2025.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja serta pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta untuk Perubahan Tahun Anggaran 2025.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PERUBAHAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Perubahan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 merupakan target tahun ke 1 dari periode Renstra Tahun 2025-2029. Terkait dengan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 Triwulan II, Realisasi pada program dan beberapa kegiatan belum tercapai sesuai target kinerja yang telah direalisasikan dan ada juga beberapa kegiatan yang pencapaian kinerjanya tidak 100%. Evaluasi capaian atas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Triwulan II yang dijabarkan dalam program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta:

Tabel 2.1

Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II

Kode	Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	APBD Murni Tahun 2025 (sesuai DPA)			Realisasi Triwulan II Tahun 2025			Sisa		Ket
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Unsur Pengawasan										
6.01	Inspektorat Daerah		Purwakarta		37.341.566.089	Purwakarta		11.321.898.100	26.019.667.989	30,32	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Purwakarta	Predikat A	30.098.826.089	Purwakarta	Predikat A	10.319.828.100	19.778.997.989	34,29	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Purwakarta		22.274.267.623	Purwakarta		8.669.045.182	13.605.222.441	38,92	
6.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Purwakarta	75 org/bulan	22.274.267.623	Purwakarta	75 org/bulan	8.669.045.182	13.605.222.441	38,92	
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah		Purwakarta		8.400.000	Purwakarta		4.200.000	4.200.000	50,00	
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jml laporan Penatausa	Purwakarta	1 laporan	8.400.000	Purwakarta	1 Laporan	4.200.000	4.200.000	50,00	

		haan Barang Milik Daerah pada SKPD									
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Purwakarta		1.268.855.000	Purwakarta		87.916.000	1.180.939.000	6,93	
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jml pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Purwakarta	22 orang	1.207.200.000	Purwakarta	14 orang	87.916.000	1.119.284.000	7,28	
6.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jml paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	1 Paket	61.655.000	Purwakarta	-	0	61.655.000	0,00	
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Purwakarta		1.706.667.466	Purwakarta		394.881.289	1.311.786.177	23,14	
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jml paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yg disediakan	Purwakarta	1 paket	107.990.000	Purwakarta	1 paket	46.866.000	61.124.000	43,40	
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket	Purwakarta	1 paket	91.017.000	Purwakarta	1 paket	0	91.017.000	0,00	

	Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Pelayanan Kantor yang disediakan									
6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Purwakarta	1 paket	85.950.000	Purwakarta	1 paket	43.395.000	42.555.000	50,49	
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Purwakarta	1 paket	279.606.000	Purwakarta	1 paket	119.683.000	159.923.000	42,80	
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jml paket Barang Cetakan dan Penggandaan yg disediakan	Purwakarta	1 paket	171.204.466	Purwakarta	1 paket	50.395.500	120.808.966	29,44	
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jml laporan fasilitasi kunjungan tamu	Purwakarta	12 Laporan	170.900.000	Purwakarta	4 Laporan	76.430.000	94.470.000	44,72	
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	12 Laporan	800.000.000	Purwakarta	4 Laporan	58.111.789	741.888.211	7,26	

6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Purwakarta		1.643.442.000	Purwakarta		0	1.643.442.000		
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Purwakarta	11 Unit	994.749.000			0	994.749.000		
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Purwakarta	20 Unit	648.693.000			0	648.693.000		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		Purwakarta		2.734.144.000	Purwakarta		1.123.987.129	1.610.158.871	41,11	
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jml laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	1 Laporan	14.000.000	Purwakarta	0 Laporan	0	14.000.000	0,00	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jml laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purwakarta	60 Laporan	236.004.000	Purwakarta	30 Laporan	70.121.355	165.882.645	29,71	

		yg disediakan									
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diselesaikan	Purwakarta	12 Laporan	2.484.140.000	Purwakarta	3 Laporan	1.053.865.774	1.430.274.226	42,42	
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Purwakarta		463.050.000	Purwakarta		39.798.500	423.251.500	8,59	
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Purwakarta	22 Unit	287.500.000	Purwakarta	5 Unit	5.238.500	282.261.500	1,82	
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarka	Purwakarta	24 Unit	60.000.000	Purwakarta	0 Unit	0	60.000.000	100	

	Operasional atau Lapangan	n Pajak dan Perizinannya									
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Purwakarta	150 Unit	49.690.000	Purwakarta	40 Unit	34.560.000	15.130.000	69,55	
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jml Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	Purwakarta	1 Unit	65.860.000	Purwakarta	0 Unit	0	65.860.000	0,00	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP), Persentase tindak lanjut temuan, Jumlah Temuan BPK, Persentase riviulaporan yang dilaksanakan	Purwakarta	Level 3; 80 Persen; 10 Temuan; 100 Persen	5.042.550.000	Purwakarta	Level 3; Persen; 16 Temuan; 85,50 persen	993.890.000	4.048.660.000	19,71	
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Purwakarta		4.750.050.000	Purwakarta		903.670.000	3.846.380.000	19,02	

6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Purwakarta	47 Laporan	1.017.300.000	Purwakarta	21 Laporan	121.015.000	896.285.000	11,90	
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Purwakarta	47 Laporan	1.560.100.000	Purwakarta	23 Laporan	564.745.000	995.355.000	36,20	
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Purwakarta	1 Laporan	1.009.200.000	Purwakarta	0 Laporan	136.840.000	872.360.000	13,56	
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Purwakarta	1 Laporan	17.850.000	Purwakarta	0 Laporan	0	17.850.000	0,00	
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Purwakarta	65 Laporan	816.550.000	Purwakarta	0 Laporan	81.070.000	735.480.000	9,93	
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Purwakarta	4 Dokumen	329.050.000	Purwakarta	0 Dokumen	0	329.050.000	0,00	

		an BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP									
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Purwakarta		292.500.000	Purwakarta		90.220.000	202.280.000	30,84	
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang Ditangani	Purwakarta	2 Laporan	25.200.000	Purwakarta	1 Laporan	1.800.000	23.400.000	7,14	
6.01.02.2.02.02.18.08	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jml laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Purwakarta	5 Laporan	267.300.000	Purwakarta	2 Laporan	88.420.000	178.880.000	33,08	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Capaian MCP KPK, Jumlah PD yang sudah menerapkan Zona Integritas	Purwakarta	81 Persen; 2 PD	2.200.190.000	Purwakarta	-	8.180.000	2.192.010.000	0,37	
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		Purwakarta		2.200.190.000	Purwakarta		8.180.000	2.192.010.000	0,37	
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan	jml perangkat daerah yg	Purwakarta	47 Perangkat Daerah	1.285.810.000	Purwakarta	29 Perangkat Daerah	0	1.285.810.000	0,00	

	Pemerintah Daerah	dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah									
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Purwakarta	15 Perangkat Daerah	400.200.000	Purwakarta	0 Perangkat Daerah	8.180.000	392.020.000	2,04	
6.01.01.2.02.04	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Purwakarta	47 Perangkat Daerah	514.180.000	Purwakarta	2 Perangkat Daerah	0	514.180.000	0,00	

2.2 Permasalahan Pelaksanaan Program Triwulan II Tahun 2025

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta berkaitan pemenuhan dan peningkatan kinerja dalam kurun waktu hingga Triwulan II Tahun 2025 adalah:

1. Belum memadainya jumlah aparatur pengawasan terhadap jumlah objek pengawasan (Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan) yang menjadi ruang lingkup Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan;
2. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung operasional dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

Adapun jumlah aparatur pengawas Inspektorat Daerah dapat dilihat pada Peta Jabatan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Peta Jabatan Inspektorat Daerah

No	Jabatan	K	Bz	Kb	S
1.	Inspektur	14	1	1	0
2.	Sekretaris	12	1	1	0
3.	Inspektur Pembantu Wilayah I	12	1	1	0
4.	Inspektur Pembantu Wilayah II	12	1	1	0
5.	Inspektur Pembantu Wilayah III	12	1	1	0
6.	Inspektur Pembantu Wilayah IV	12	1	1	0
7.	Inspektur Pembantu Khusus	12	1	1	0
8.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Madya	11	7	8	-1
9.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Muda	9	5	14	-9
10.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Pertama	8	10	20	-10

No	Jabatan	K	Bz	Kb	S
11.	Auditor Utama	14	1	1	0
12.	Auditor Madya	12	8	8	0
13.	Auditor Muda	10	10	23	-13
14.	Auditor Pertama	8	7	25	-18
15.	Auditor Penyelia	8	2	6	-4
16.	Auditor Mahir	7	0	8	-8
17.	Auditor Terampil	6	2	10	-8
18.	Perencana Ahli Muda	9	0	1	-1
19.	Perencana Ahli Pertama	8	1	1	0
20.	Pengolah Data dan Informasi	6	2	2	0
21.	Kasubbag. Keuangan	9	1	1	0
22.	Penelaah teknis kebijakan	7	1	1	0
23.	Pengadministrasi perkantoran	5	3	3	0
24.	JF Analis SDM Muda	9	1	1	0
25.	JF. Analis SDM Pertama	8	0	1	-1
26.	Pengolah Data dan Informasi	6	4	6	-2
27.	Arsiparis Ahli Pertama	6	1	1	0
28.	Pengadministrasi Perkantoran	5	3	5	-2
Jumlah		-	76	154	-78

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang tertuang, rekomendasi yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Daerah Tahun 2025 adalah :

1. Mengajukan penambahan SDM aparatur pengawasan baik melalui penerimaan CPNS maupun melalui perpindahan jabatan;
2. Pelaksanaan pelatihan menyesuaikan dengan jadwal pelatihan dari BPKP;
3. Mengikutsertakan aparatur pengawasan dalam pelatihan Inventigasi, PKKN maupun *Fraud Control Plan* sehingga diharapkan APIP mampu menyusun

kebijakan terkait percepatan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

4. Menyusun kegiatan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang belum memadai seperti peningkatan anggaran pendidikan dan pelatihan serta sarana prasarana penunjang operasional pengawasan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang diusung dalam RKP Tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” sebagai tongkat estafet keberlanjutan pembangunan yang harus terus dibawa menuju pencapaian cita-cita berbangsa dan bernegara. Tema RKP 2025 bakal diwujudkan melalui 3 arah kebijakan prioritas pembangunan. Pertama, SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa. Kedua, infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah. Ketiga, ekonomi inklusif dan berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan garis besar pembangunan dalam RKP Tahun 2025 serta arah kebijakan dan prioritas RPJMN Tahun 2025 – 2029, kebijakan dan langkah strategis yang diambil oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan kualitas aparatur APIP melalui pendidikan dan pelatihan;
2. Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dalam rangka percepatan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pendampingan;
4. Membangun dan menjalin koordinasi yang baik dengan pihak eksternal yang terkait dengan fungsi pengawasan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Kabupaten Purwakarta dalam RKPD Perubahan Tahun 2025 adalah “Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang Profesional”. Adapun program prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Peningkatan Kualitas SDM dan Pemajuan Kebudayaan
2. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan dan KB
3. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana
4. Pengembangan Koperasi dan UMKM
5. Peningkatan Nilai Investasi, Usaha Industri dan Perdagangan
6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Masyarakat
7. Peningkatan Produksi Pangan, Pertanian dan Perikanan
8. Penanganan Sosial Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Dasar di semua Wilayah
10. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
11. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
12. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Dengan memperhatikan Prioritas Kebijakan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 tersebut, arah kebijakan dan langkah strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan dirumuskan dengan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2024
1	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan publik yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital	Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	1. Capaian SAKIP Perangkat Daerah	A
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat Baik
			3. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	2 OPD
			4. Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
			5. Persentase Tindak Lanjut Temuan	80%
			6. Persentase Capaian SAKIP Perangkat Daerah yang mendapat Predikat minimal B	85%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Kerja. Pencapaian Renstra dan Visi Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta yang tertuang pada RKPD. Program kerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RKPD Kabupaten Purwakarta adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Indikator kinerja dari tiga program tersebut menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam Perubahan RKPD, dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 terdapat 3 program, 10 kegiatan dan 31 Sub Kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung.

Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundang yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh kegiatan Inspektorat Daerah yang tertuang dalam Perubahan Renja didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Purwakarta.

Tabel 4.1

Perubahan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Tahun 2025

Kode	Perangkat Daerah/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Indikator (sesuai DPA)	APBD Murni Tahun 2025 (sesuai DPA)			Perubahan Tahun 2024			Selisih		Ket
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif	Lokasi	Target	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Unsur Pengawasan										
6.01	Inspektorat Daerah		Purwakarta		37,341,566,089	Purwakarta		24,157,471,843	(13,184,094,246)		
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Purwakarta		30,098,826,089	Purwakarta		20,768,235,843	(9,330,590,246)		
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Purwakarta		22,274,267,623	Purwakarta		15,116,158,610	(7,158,109,013)		
6.01.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan PNS	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Purwakarta	75 org/bulan	22,274,267,623	Purwakarta	75 org/bulan	15,116,158,610	(7,158,109,013)		
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah		Purwakarta		8,400,000	Purwakarta		8,400,000	-		
6.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jml laporan Penatausahaan Barang Milik	Purwakarta	1 laporan	8,400,000	Purwakarta	1 Laporan	8,400,000	-		

		Daerah pada SKPD									
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Purwakarta		1,268,855,000	Purwakarta		907,200,000	(361,655,000)		
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jml pegawai berdasarkan tugas dan fungsinya yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Purwakarta	22 orang	1,207,200,000	Purwakarta	22 orang	907,200,000	(300,000,000)		
6.01.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jml paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Purwakarta	1 Paket	61,655,000	Purwakarta	1 Paket	-	(61,655,000)		
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Purwakarta		1,706,667,466	Purwakarta		1,095,630,233	(611,037,233)		
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jml paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yg disediakan	Purwakarta	1 paket	107,990,000	Purwakarta	1 paket	107,990,000	-		
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Pelayanan Kantor yang disediakan	Purwakarta	1 paket	91,017,000	Purwakarta	1 paket	10,742,000	(80,275,000)		

6.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Purwakarta	1 paket	85,950,000	Purwakarta	1 paket	85,950,000	-		
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Purwakarta	1 paket	279,606,000	Purwakarta	1 paket	234,446,000	(45,160,000)		
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jml paket Barang Cetakan dan Peggandaan yg disediakan	Purwakarta	1 paket	171,204,466	Purwakarta	1 paket	85,602,233	(85,602,233)		
6.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jml laporan fasilitasi kunjungan tamu	Purwakarta	12 Laporan	170,900,000	Purwakarta	12 Laporan	170,900,000	-		
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta	12 Laporan	800,000,000	Purwakarta	12 Laporan	400,000,000	(400,000,000)		
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Purwakarta		1.643.442.000	Purwakarta		511,513,000	(1,131,929,000)		
6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang	Purwakarta	11 Unit	994.749.000			-	(994,749,000)		

	Operasional atau Lapangan	dilaksanakan									
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan barang milik daerah yang dilaksanakan	Purwakarta	20 Unit	648.693.000			511,513,000	(137,180,000)		
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		Purwakarta		2,734,144,000	Purwakarta		2,832,144,000	98,000,000		
6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jml laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	1 Laporan	14,000,000	Purwakarta	1 Laporan	14,000,000	-		
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jml laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yg disediakan	Purwakarta	60 Laporan	236,004,000	Purwakarta	60 Laporan	236,004,000	-		
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang diselesaikan	Purwakarta	12 Laporan	2,484,140,000	Purwakarta	12 Laporan	2,582,140,000	98,000,000		
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Purwakarta		463,050,000	Purwakarta		297,190,000	(165,860,000)		

6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Purwakarta	22 Unit	287,500,000	Purwakarta	22 Unit	187,500,000	(100,000,000)		
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Purwakarta	24 Unit	60,000,000	Purwakarta	24 Unit	60,000,000	-		
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Purwakarta	150 Unit	49,690,000	Purwakarta	150 Unit	49,690,000	-		
6.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jml Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Purwakarta	1 Unit	65,860,000	Purwakarta	1 Unit	-	(65,860,000)		
6.01.02	Program Penyelenggar	Peningkatan Kapabilitas Aparat	Purwakarta	Level 3; 80 persen;	5,042,550,000	Purwakarta	Level 3; 80 persen;	2,591,816,500	(2,450,733,500)		

	aan Pengawasan	Pengawasan Intern (APIP), Persentase tindak lanjut temuan, Jumlah Temuan BPK, Persentase rivi laporan yang dilaksanakan		10 Temuan; 100 persen			10 temuan; 100 persen				
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Purwakarta		4,750,050,000	Purwakarta		2,428,916,500	(2,321,133,500)		
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Purwakarta	47 Laporan	1,017,300,000	Purwakarta	47 Laporan	512,700,000	(504,600,000)		
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Purwakarta	47 Laporan	1,560,100,000	Purwakarta	47 Laporan	824,100,000	(736,000,000)		
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Purwakarta	1 Laporan	1,009,200,000	Purwakarta	1 Laporan	504,600,000	(504,600,000)		
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Purwakarta	1 Laporan	17,850,000	Purwakarta	1 Laporan	10,666,500	(7,183,500)		
6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan	Purwakarta	65 Laporan	816,550,000	Purwakarta	1 Laporan	410,300,000	(406,250,000)		

		Hasil Pengawasan Desa									
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Purwakarta	4 Dokumen	329,050,000	Purwakarta	1 Dokumen	166,550,000	(162,500,000)		
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		Purwakarta		292,500,000	Purwakarta		162,900,000	(129,600,000)		
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang Ditangani	Purwakarta	2 Laporan	25,200,000	Purwakarta	2 Laporan	25,200,000	-		
6.01.02.2.02.02.18.08	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	jml laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Purwakarta	5 Laporan	267,300,000	Purwakarta	5 Laporan	137,700,000	(129,600,000)		
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampinga	Capaian MCP KPK; Jumlah PD yang sudah menerapkan	Purwakarta	81 persen; 2 PD	2,200,190,000	Purwakarta	81 persen, 2 PD	797,419,500	(1,402,770,500)		

	n dan Asistensi	Zona Integritas									
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi		Purwakarta		2,200,190,000	Purwakarta		797,419,500	(1,402,770,500)		
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	jml perangkat daerah yg dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Purwakarta	47 Perangkat Daerah	1,285,810,000	Purwakarta	47 Perangkat Daerah	233,210,000	(1,052,600,000)		
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Purwakarta	15 Perangkat Daerah	400,200,000	Purwakarta	15 Perangkat Daerah	282,679,500	(117,520,500)		
6.01.01.2.02.04	Pendampingan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Purwakarta	47 Perangkat Daerah	514,180,000	Purwakarta	47 Perangkat Daerah	281,530,000	(232,650,000)		

BAB V

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan Inspektorat Daerah yang disusun berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 44 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Purwakarta serta sasaran dan arah kebijakan pembangunan yang dilaksanakan melalui RPD Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Daerah. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dijadikan sebagai dokumen penetapan prioritas pembangunan yang menjadi penjabaran dari visi dan misi SKPD diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan bersama dengan SKPD lain.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah sehingga sasaran strategis Inspektorat dapat diwujudkan dengan baik.

Plt. INSPEKTUR



AYAT Hidayat, S.Sos., CGRE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197002151997031009